

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Komunikasi

Menurut Kincaid dalam Hasan, komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporian Nahawa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses situ terjadi kegiatan-kegiatan memberi/ mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi.¹ Sedangkan menurut *Lawrence* dalam Hafied, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.²

Menelusuri asal kata komunikasi, berasal dari bahasa latin yakni *communication* bersumber dari perkataan *communis* yang berarti sama. Menurut *Gde* dalam Hasan secara etomologi mendefinisikan, komunikasi sebagai proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monopoli satu orang saja.³

Menurut pendapat diatas, bahwa dapat di simpulkan bahwa komunikasi adalah sebagai suatu proses penyampaiaan pikiran, perasaan dari seseorang kepada orang lain atau pengoperasian ide dan gagasan untuk menyatukan

¹ Erlina Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*. (Bandung: PT Refika Aditama 2007) Hal. 17

² Hafind Cangara. *Pengantar ilmu komunikasi*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persade 2014) Hal. 22

³ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 19

kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan bersama.

Komunikasi memiliki empat tipe seperti yang dijelaskan oleh Cangara yaitu:⁴

- a. Komunikasi dengan diri sendiri (*Intrapersonal Communication*), adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi disini karna adanya seseorang yang memberikan arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia ,baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang.
- b. Komunikasi antar pribadi (*Interpersonal Communication*), adalah proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dikatakan R. Wayne Pace bahwa “*interpersonal communication is communication involving two two more people in a face setting*”.
- c. Komunikasi publik (*public communication*), bisa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, *public speaking*, dan komunikasi khalayak (*audience comunication*). Apapun namanya, komunikasi public menunjukkan suatu proses komunikasi di dalam pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Dalam komunikasi publik penyampaian pesan

⁴ Hafind Cangara. Pengantar ilmu komunikasi. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persade 2014) Hal. 34-41

berlangsung secara kontino. Dapat didetifikasi siapa yang berbicara (sumber) dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas, dan jumlah khalayak relatif besar. Sumber sering kali tidak dapat mengidentifikasi satu persatu pendengarnya.

- d. Komunikasi massa (*mass Communication*), dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembagai alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Ciri komunikasi massa ialah sumber dan penerimanya dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanis. Sumber juga suatu lembaga atau institusi yang terdiri dari banyak orang, misalnya reporter, penyiar, editor, teknisi, dan sebagainya. Oleh karena itu proses penyampaian pesan lebih formal, terencana (dipersiapkan lebih awal), terkendali oleh redaktur dan lebih rumit, dengan kata lain melembaga. Pesan komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat (tertunda) dan sangat terbatas.

Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu diantara lain:

1. Mencapai pengertian satu sama lain
2. Membina kepercayaan
3. Mengkordinir tindakan
4. Merencanakan strategi
5. Melakukan pembagian pekerjaan

6. Melakukan aktifitas kelompok
7. Berbagi rasa

Menurut Hasan komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, yaitu⁵:

1. Fungsi pengawasan
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional
4. Fungsi informasi

Komunikasi memiliki tujuan yakni seperti yang dikemukakan oleh bertolomeus dari hasan dapat diartikan sebagai:

1. Suatu kondisi yang tidak kontradiktif secara logika atau tidak konsisten dengan komunikasi itu sendiri,
2. Berpusat pada perilaku, yaitu diekspresikan dalam pengertian perilaku manusia,
3. Cukup relevan bagi kita untuk dapat menghubungkannya dengan perilaku komunikasi yang actual,
4. Konsisten dengan cara orang-orang berkomunikasi.

Komunikasi di antara orang-orang di dalam sebuah organisasi dan dipemerintahan tetap diperlukan, karena komunikasi antar individu tidak bergantung pada teknologi melainkan lebih bergantung pada kekuatan dalam masyarakat dan lingkungan, menurut *Bride dan Leswell* dari Hasan bahwa

⁵ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 23-27

komunikasi itu roh dan jiwanya dinamika kehidupan masyarakat.⁶ Oleh karena itu peran komunikasi sangatlah penting dalam pemerintahan dan masyarakat.

Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain strategi dan taktik berkomunikasi yang dikembangkan komunikator. Apabila komunikasi itu dilihat dalam lingkup pemerintah, maka aparatur pemerintah adalah komunikatornya. Namun menurut Hardjanah, indikator efektivitas komunikasi dapat diukur dengan enam kriteria yakni penerima komunikasi (*receiver*), isi pesan (*content*), ketepatan waktu (*time*), ketepatan pesan (*accuracy*), dan kemudahan pemahaman pesan (*intelligibility*).⁷

- a) Penerima komunikasi (*Receiver*) adalah definisi dimensi penerima pesan merupakan objek yang diharapkan untuk menerima pesan tersebut, yang diukur berdasarkan ketepatan siapa yang akan menerima pesan tersebut. Seorang penerima atau pemakai pesan dikatakan efektif jika penerima pesan sesuai dengan yang dituju. Dan jika penerima pesan sesuai dengan penerima yang penerima dituju oleh media tersebut.
- b) Isi Pesan (*Content*) definisi isi pesan merupakan kesesuaian tujuan komunikasi dengan fakta dan aktualitas informasi yang diterima oleh audiens. Dalam hal ini yang dimaksud dengan isi pesan adalah paparan informasi-informasi yang diberikan oleh organisasi kepada audiens.
- c) Ketepatan waktu (*Timing*), definisi ketepatan waktu adalah bahwa pesan yang dimaksudkan kepada penerima tepat pada waktunya sesuai dengan kondisi dan situasi yang diukur.

⁶ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 42

⁷ Reny An Nisa Syabrina. 2018. Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival dammar kurung gresik. Hal. 3

- d) Ketepatan pesan (*accuracy*), adalah menunjuk kepada kemampuan orang untuk memproduksi atau menciptakan suatu pesan yang tepat. Atau dengan kata lain tingkat persesuaian arti pesan yang dimaksudkan si pengirim dengan arti yang diinterpretasikan oleh si penerima.
- e) Kemudahan pemahaman pesan (*intelligibility*), Dalam komunikasi wicara, kejelasan adalah ukuran bagaimana pidato yang dapat dipahami dalam kondisi tertentu. Jadi kemudahan pemahaman pesan adalah bagaimana pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh penerima.

Komunikasi ditunjukkan pada strategi dan taktik berkomunikasi, strategi menurut *Robbins* dalam Hasan mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan dari tujuan jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan. Menurut *Miles & Snow* dari Hasan strategi struktur adalah penilaian dari manajemen atas ketidakpastian lingkungan. Sedangkan menurut *Defender* menunjuk kepada lingkungan seolah-olah stabil, yang objektif.⁸

Berhasil tidaknya suatu strategi komunikasi, di tentukan oleh kemampuan sistematis antar komponen-komponen yang terkait yang akan merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam pernyataan *Lesswel* yakni:

1. *Who*, Siapa komunikatornya?
2. *Says what*, Pesan apa yang dinyatakannya?
3. *In which channel*, Media apa yang digunakan?
4. *To whom*, Siapa komunikannya?

⁸ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 43-45

5. *With what effect*, Dampak apa yang diharapkan?

Strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting karena seorang komunikator yang mampu melancarkan komunikasi secara luwes tentu akan dapat dengan mudah melakukan ketika ada atau tidak ada suatu faktor yang mempengaruhi. Karena strategi komunikasi merupakan suatu kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan Negara dan pemerintahan.⁹ Dikaitkan dengan ilmu pemerintahan, maka kemampuan tersebut dapat meliputi kemampuan mengajak orang lain bekerjasama yang didalamnya mencakup aktivitas merencanakan, melaksanakan mengendalikan dan kemampuan melakukan kontrol atau evaluasi.

2. 2. Komunikasi Pemerintahan

Menurut Hasan komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara, dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam susunan tersebut bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.¹⁰ Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun fungsi komunikasi pemerintahan menurut Erlina Hasan:

⁹ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 47

¹⁰ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 95

1. Memberikan informasi kepada publik,
2. Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan,
3. Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab,
4. Memfasilitasi dialog antar institusi dan warga negara.

Menurut *Malone* dalam *Ulber* Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*).¹¹

2. 3. Pemerintahan Desa

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua

¹¹ Ulber Silalahi, Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik, 3.1 2004, Hal. 36

mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara.¹² Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Menurut Puji dari Hasan secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari “perintah” berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Sementara Strong dalam Hasan menyatakan Pemerintahan memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang di beri tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan Negara.¹³

Hasan juga menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajaran guna mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan Negara.

Tugas pokok pemerintahan yang mendasar adalah untuk menjadi sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan secara wajar.

¹² Kirana Kawengian. Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung. Volume VI. No. 2. 2017. Hal. 6

¹³ Erlina Hasan, *Op.Cit.* Hal. 1-2

Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan interaksi yang berkembang, maka berkembang pulalah aktivitas pemerintah menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut Hasan tugas pokok pemerintahan dapat mencakup pada bidang¹⁴:

1. Keamanan, Negara dari segala kemungkinan serangan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya tawuran, gotok-gotokan dan konflik antar suku di antara warga masyarakat, dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai.
3. Keadilan, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai porsi dari profesionalisasi kemampuan dalam aktivitasnya. Secara konkrit keadilan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui keputusan-keputusan, kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut pemerintahan berani berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan manapun.
4. Kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pemerintah membuat orang-orang tidak mampu, orang-orang cacat, dan anak terlantar, menampung serta menyulurkan para pencari kerja dan

¹⁴ Erlina Hasan, *Op. Cit.* Hal. 3

gelandangan kepada sektor-sektor informal maupun sektor formal, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan dan menikmati tingkat kesejahteraan sesuai kemampuan dan profesi yang dimiliki.

5. Ekonomi, dalam bidang ekonomi pemerintahan harus mampu menelorkan berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya memajukan perdagangan dalam dan luar Negeri, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengendalikan laju inflasi, serta mampu menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Negara.
6. Pekerjaan umum, dalam bidang ini pemerintah memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintahan. Kegiatan pekerjaan umum antara lain mencakup penyediaan fasilitas pendidikan pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular serta pembangunan jalan dan jembatan.
7. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang ini mencakup bidang pemeliharaan air, tanah, dan hutan. Untuk bidang ini pemerintahan mencakup pula memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna memanfaatkan sumber daya alam dengan mengendapkan antara pemakaian dan pengembangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri beberapa daerah kabupaten/kota, selanjutnya dalam kabupaten/kota terdapat pemerintahan

terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan adalah suatu pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Menurut pendapat Hanif, desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat dan istiadat yang relatif sama, dan memiliki tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagiaian besar mata pencariannya bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagai besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.¹⁵

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desa dibedakan dengan kelurahan.¹⁶ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara, sedangkan kelurahan adalah suatu administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/ kota.

Menurut Soetarjo dalam Hanif mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat.¹⁷ Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri tersebut:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong

¹⁵ Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga 2011). Hal. 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁷ Hanif Nurcholis. *Ibid*, Hal. 20

2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/ kumpulan desa
3. Peranan dan lembaga di kembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematikanya.
4. Tanah Komunal menjadi peranan sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan
5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi peranan yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonom daerah

Isi otonom desa mencakup:

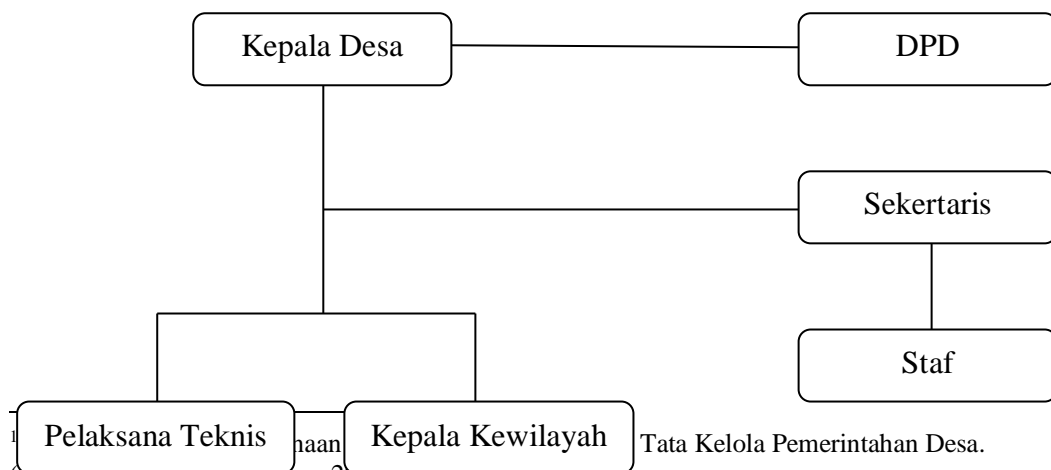
- a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar,
- b. Keamanan dan ketertiban/polisional,
- c. Peradilan,
- d. Pekerja umum,
- e. Upacara keagamaan ,
- f. Pertanian/ perikanan/ perhutanan.

Fungsi utama pemerintah secara umum yang melekat juga pada penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari tiga hal yaitu : Fungsi pelayanan, Fungsi pembangunan, dan Fungsi pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:¹⁹

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
2. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melakukan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerja seperti kepala dusun

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



¹⁸ Hanif Nurcholis. *Op. Cit.* Hal. 73

2. 4. Musrenbang

Menurut Haedjosoekarto, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) daerah merupakan instrument dan mekanisme penting yang berfungsi menjaring dan mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan dari ketiga pemangku kepentingan daerah tersebut. Dengan demikian, perancangan pembangunan dan implementasinya merupakan respons ideal yang berorientasi pada kepentingan seluruh komponen daerah.²⁰

Menurut Djohani, Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, berkerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.²¹

Secara substansi, perancangan pembangunan merupakan perwujudan dari kepentingan daerah untuk membangun atas dasar prioritas kebutuhan dan permasalahan, dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan suatu daerah untuk menjalankan proses pembangunan secara berkesinambungan yang bermuara pada kemajuan daerah. Karna itu, ada tiga pilar utama sebagai

²⁰ Sudarsono Haedjosoekarto, Pengkajian Fungsi pengawasan DPD RI Dalam Musrenbang. (Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2014). Hal. 1

²¹ Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Perancangan Pembangunan Desa. (FPPM 2008). Hal. 3

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pembangunan yang bertanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan pembangunan di daerah:

1. Pemerintah (birokrasi)
2. Pengusaha (pasar)
3. Masyarakat (*civil society*)

2. 5. Musrenbang Desa

Menurut Djohani, Musrenbang desa adalah forum dialog antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.²² Musrenbang desa merupakan istilah yang sudah memiliki arti yang jelas merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.

Menurut Djohani tujuan Musrenbang desa yaitu:

1. Menyampaikan prioritas kebutuhan/ masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan rencana. Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut:
 1. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat.

²² *Ibid*, Hal. 5

2. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota atau sumber dana lainnya.
 3. Prioritas masalah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/ kota atau APBD provinsi.
2. Menyampaikan Tim Delegasi desa yang akan di usulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintahan daerah/ SKPD tahun berikutnya.

Adapun Luaran Musrenbang desa adalah:

- a) Daftar Prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- b) Daftar prioritas masalah daerah yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang; 3 orang, minimal 1 orang perempuan; 5 orang, minimal 2 orang perempuan).
- c) Berita Acara Musrenang desa.

2. 6. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan Posisi yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam musrenbang dapat diketahui melalui teori Erlina Hasan yang berisi fungsi komunikasi pemerintahan.

Bagan 2.2 Krangka Pikir

Analisis Komunikasi Pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan(Musrenbang)
di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk
Raja Kabupaten OKU



Unit Analisis:

1. Memberikan informasi kepada publik
2. Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan
3. Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab
4. Memfasilitasi dialog antar istitusi dan warga negara



Tercapainya komunikasi pemerintah yang
baik dalam musrenbang